



DINAS KELAUTAN PERIKANAN KABUPATEN BOALEMO



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Yos Sudarso, Tilamuta – 96263, email:

dkpboalemo74@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR 25 TAHUN 2022

T E N T A N G

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2022

KEPALA DINAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari integral dari pembangunan daerah Kabupaten Boalemo, perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2023-2026;.
 - b. Bahwa mengefektifkan dan mengoptimalkan proses penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tahun 2023-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 45 Tahun 2009
5. Undang-Undang-Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional,
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014
8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang system Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 7);
14. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Boalemo tahun 2011-2005;
15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 484).
16. Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Boalemo;
17. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan fungsi dan Tatakerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo.
18. Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo 2011-2025.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026.**

KESATU : Membentuk Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah

- a. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra SKPD Tahun 2023-2026 termasuk capaian kemajuannya;
- b. Mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo
- c. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra SKPD Tahun 2023-2026
- d. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan renstra
- e. Menyusun Renstra SKPD Tahun 2023-2026

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada tanggal : Maret 2022



Ir. ASRA UMAR MURAD
Nip. 19680928 200012 2 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOALEMO.

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : MARET 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026

SUSUNAN TIM :

**Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Boalemo.**

Koordinator : KEPALA DINAS

Ketua : SEKRETARIS

Sekretris : KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Anggota : 1. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP

2. KEPALA BIDANG BINA MUTU

3. FUNGSIONAL PERENCANA

4. PENYULUH PERIKANAN

5. ANALISIS PASAR HASIL PERIKANAN

6. PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

7. PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada tanggal : Maret 2022

KEPALA DINAS



Ir. ASRA UMAR MURAD

Nip. 19680928 200012 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Yos Sudarso, Tilamuta – 96263, email: dkpboalemo74@gmail.com

PERATURAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-206.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo selama periode Tahun 2023-2026.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 merupakan acuan dalam

mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal Maret 2022

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan
Kabupaten Boalemo,



Ir. ASRA UMAR MURAD
NIP. 19680928 200012 2 006

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo
Nomor : 26 Tahun 2022
Tanggal : Maret 2022

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				Akhir capaian
				2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boalemo			Nilai	57	60	63	66	66
	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	Predikat	B	BB	BB	A	A
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	Persen	100	100	100	100	100

		Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	80	80	80	80	80
		Jumlah Penerimaan PAD (khusus OPD pemungut PAD) (juta)	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
		Presentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	25	30	35	40	40
Meningkatkan Perekonomian masyarakat yang berkelanjutan			%	97.89	98.87	99.86	100.86	100.86
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Meningkat Hasilnya	Ton	27,088	27,359	27,632	27,908	27,908

		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang Meningkat Hasilnya	Ton	2,323	2,346	2,369	2,393	2,393
	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten boalemo	Rata – rata konsumsi ikan masyarakat	Kg/Kapita/Thn	45.24	46.36	47.36	48.36	48.36

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal : Maret 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Boalemo,



Ir. ASRA UMAR MURAD
NIP. 19680928 200012 2 006

KATA PENGANTAR



Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat - Nya sehingga dapat diselesaikannya **“Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026”** sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan Pembangunan Perikanan pada tahun 2022 hingga sampai tahun 2026 nanti, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Boalemo

Periode 2023-2026,

Rancangan Renstra ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan periode 2023-2026 dan diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Boalemo terutama untuk sektor Kelautan dan Perikanan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Boalemo.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Renstra ini dapat terselesaikan, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terkait. Akhir kata semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, demi kemajuan dan perkembangan pembangunan Perikanan di Kabupaten Boalemo sampai tahun 2022 nanti.

Tilamuta, 2022

KEPALA DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
KABUPATEN BOALEMO



Ir. Asra Umar Murad
NIP. 19680928 200012 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL & GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	8
2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	33
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	35
3.2. Telaahan Tujuan Sasaran RPD Kabupaten Boalemo.....	37
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	43
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan	50
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	113
BAB VII. PENUTUP	118

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan	14
Tabel T-C 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	26
Tabel T-C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKP	28
Tabel T.B.35.	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	35
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DKP	45
Tabel T-C 26	Strategi dan Arah Kebijakan	50
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan	58
Tabel T-C 27.2	Formula Pengukuran Program dan Kegiatan.....	95
Tabel T-C 28	Indikator Kinerja DKP yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	115
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	117



PENDAHULUAN

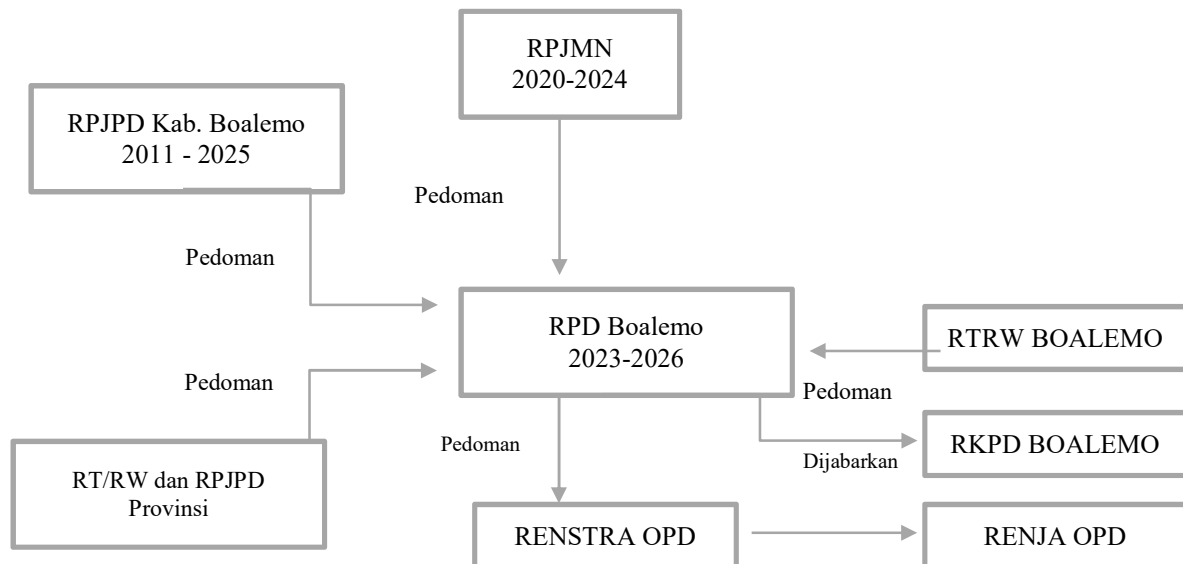
1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (Empat) tahun yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri dalam Negeri No 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 - 2026.

Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 - 2026. Dalam hal ini Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama 4 tahun dengan mempertimbangkan Rencana Perangkat Daerah (RPD) sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (RPD), Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahunan.

Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1. di bawah ini.



Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Juga sebagai panduan dalam penyusunan pelaksanaan, evaluasi program kebijakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 - 2026

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo 2023-2026 adalah:

- 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
- 14 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boalemo 2011 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291).
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 26 Peraturan Bupati Boalemo Nomor 47 Tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah Badan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 27 Peraturan Bupati Boalemo Nomor 17 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah Tahun 2023 – 2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo 2023-2026 disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo setiap tahunnya serta sebagai pedoman bagi seluruh personil di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk empat tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo 2023-2026 disusun dengan tujuan:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Sebagai pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo dalam penyusunan penganggaran selama 4 (empat) tahun periode Renstra.
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah selama 4 (empat) tahun periode Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian - capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Perangkat daerah (RPD) periode sebelumnya, dan mengulas hambatan - hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, penelaah terhadap RPJPD, Renstra KL, RT TW, Penentuan isu – isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo

BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo dalam empat tahun mendatang.

BABVI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BABVII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII : PENUTUP



GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, diuraikan bahwa tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan untuk membantu Bupati, dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana program/kegiatan tahunan tingkat Kabupaten yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sektor Kelautan dan Perikanan;
- 2) memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang Kelautan dan Perikanan;
- 3) menyelenggarakan pembinaan teknis dan manajerial usaha Kelautan dan Perikanan;
- 4) menyelenggarakan pembinaan atas pengelolaan / pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- 5) menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka struktur organisasi dan tata kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo terdiri dari :

(1) Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah di bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Bidang Bina Mutu Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan dan rencana pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dinas ;
- b. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas;
- c. pengendalian, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. memberikan saran dan pertimbangan, masukan/telaahan kepada Bupati, Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah mengenai kebijakan yang perlu diambil dalam bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Sekretariat

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- b. Kelompok jabatan Fungsional

Tugas Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan hubungan masyarakat.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan rencana program dan kegiatan serta penyusunan bahan laporan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja Dinas;
- b. mengoordinasikan kegiatan operasional perencanaan, administrasi umum, ketatausahaan, perpustakaan, arsip, kepegawaian, kehumasan, protokol, pengelolaan perlengkapan rumah tangga badan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat berupa pengkajian kebijakan teknis di bidang sekretariat;
- e. mengoordinasikan penyusunan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- f. memfasilitasi penyusunan bahan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ Dinas Kelautan dan Perikanan;

- g. memfasilitasi penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan (SP);
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- l. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- m. memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- o. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan melaksanakan urusan tata usaha, penyusunan organisasi, tatalaksana, keuangan dan asset, sarana prasarana, reformasi birokrasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

sub Bagian umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. penyiapan bahan kerja;
- c. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, Kearsipan, urusan perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kantor, penyiapan penyelenggaraan rapat dinas serta tatalaksana;
- e. Merencanakan kebutuhan barang;
- f. Menyelia terhadap pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris daerah;
- g. Melakukan penataan dan pengelolaan barang inventaris daerah;
- h. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan system akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan RKA -Dinas dan DPA-Dinas;
- k. Melaksanakan inventarisasi verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada keuangan atau pengadministrasi keuangan;

- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan
- n. Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- o. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset;
- p. Menyusun laporan keuangan tahunan yang terdiri dari CALK laporan realisasi anggaran Neraca;
- q. Menyusun Rencana Operasional Kerja (ROK), Rencana Pengadaan Barang (RUPB) SKPD;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya;
- s. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- t. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Bidang Perikanan Tangkap

Tugas Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terkait dengan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Kenelayanan, dan Usaha Perikanan Tangkap serta Pengembangan Produksi dan Pengembangan Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun perencanaan program/kegiatan perikanan tangkap;
- b. Melaksanakan kegiatan identifikasi, perumusan, pembinaan terhadap pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, kenelayanan dan usaha perikanan tangkap serta pengembangan produksi dan pengembangan penangkapan Ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.;
- c. Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik perikanan tangkap;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap dengan UPTD terkait;
- f. Menelaah dalam menyiapkan perijinan dibidang pengembangan perikanan tangkap;
- g. Memberikan bahan pertimbangan/telaahan kepada Kepala Dinas tentang Kebijakan Perikanan Tangkap;

- h. Menyiapkan bahan kajian kepada Kepala Dinas terkait sinkronisasi regulasi berbagai peraturan dan perundangan di bidang perikanan tangkap baik sektoral maupun lintas sektor;
- i. Melaksanakan pembinaan teknis dan memfasilitasi penerapan teknologi penangkapan ikan dalam peningkatan produksi Perikanan Tangkap;
- j. Menyelenggarakan sistem pelaporan teknis, administrasi dan keuangan di bidang perikanan tangkap;
- k. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Bidang Perikanan Tangkap;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(4) Bidang Perikanan Budidaya

Tugas Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas dalam Pembangunan Perikanan budidaya terkait dengan Pengembangan Kawasan Budidaya, Pengelolaan Sistem Perbenihan dan Pakan Ikan serta Pengembangan Produksi, Usaha Budidaya dan Kesehatan Lingkungan.

Bidang Perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya;
- b. melaksanakan kegiatan identifikasi, perumusan, pembinaan terhadap pengembangan kawasan, pengelolaan sistem perbenihan dan pengembangan pakan ikan serta pengembangan sistem produksi, usaha budidaya dan kesehatan lingkungan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik perikanan budidaya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kaji terap teknologi dibidang perikanan budidaya;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pemantauan, monitoring penyakit ikan dan lingkungannya;
- f. melaksanakan pengembangan sistem informasi (Lahan dan air, Sistem Data Statistik, Aquacard, SSMP, Cara Budidaya Ikan Yang Baik);
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya dengan UPTD terkait;
- h. menelaah dalam menyiapkan perijinan dibidang pengembangan perikanan budidaya;
- i. memberikan bahan pertimbangan/telaahan kepada Kepala Dinas tentang Kebijakan nasional Perikanan Budidaya
- j. menyiapkan bahan kajian kepada Kepala Dinas terkait sinkronisasi regulasi berbagai peraturan dan perundangan di bidang perikanan budidaya baik sektoral maupun lintas sektor;

- k. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup Bidang Perikanan Budidaya;
- l. menyelenggarakan sistem pelaporan teknis, administrasi dan keuangan di bidang perikanan budidaya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

(5) Bidang Binas Mutu

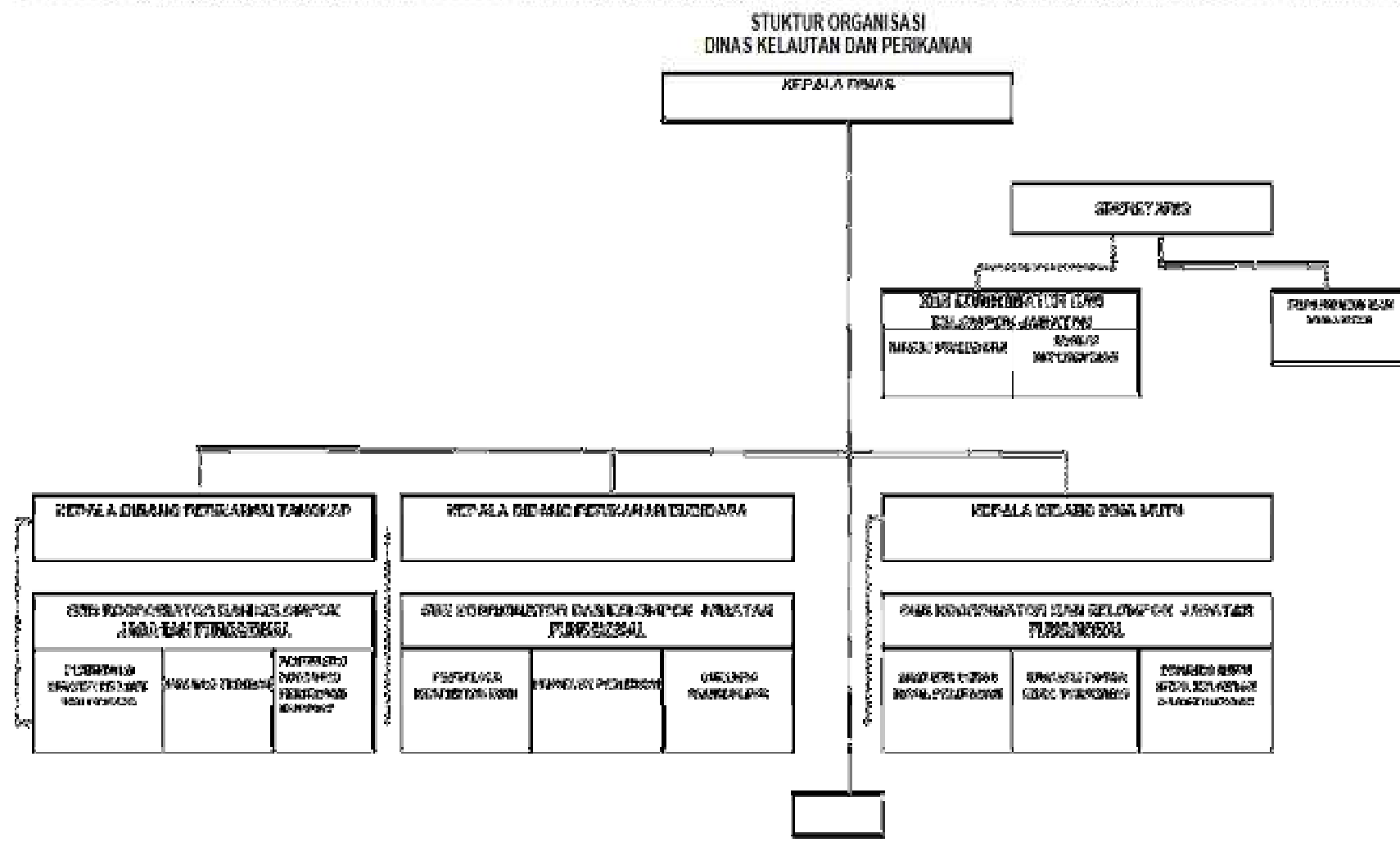
Tugas Bidang Bina Mutu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terkait dengan Pengolahan Hasil Perikanan, Pemasaran Hasil Perikanan serta Perizinan dan Retribusi bidang perikanan.

Bidang Bina Mutu mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan program/kegiatan Bidang Bina Mutu;
- b. Melaksanakan kegiatan identifikasi, perumusan, pembinaan terhadap Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, serta Perizinan dan Retribusi bidang perikanan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perizinan dan retribusi dengan UPTD terkait;
- e. Melaksanakan supervisi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembinaan mutu, usaha dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan investasi usaha dan promosi sektor perikanan dan kelautan;
- g. Menyenggarakan sistem pelaporan teknis, administrasi dan keuangan di Bidang Bina Mutu;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup Bidang Bina Mutu;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(6) Jabatan Fungsional

Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan



2.2. SUMBER DAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 36 (tiga puluh enam) Orang, terdiri dari 18 (delapan belas) orang laki-laki dan 18 (delapan belas) orang perempuan;

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Negeri Sipil (ASN) Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021 Kabupaten Boalemo

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki – laki	18 Orang	
2.	Perempuan	18 Orang	
JUMLAH		36 Orang	

2. Non PNS/Tenaga Kontrak 24 (dua puluh empat) Orang, terdiri dari 14 (empat belas) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan;

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Non PNS / Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021 Kabupaten Boalemo

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki – laki	14 Orang	
2.	Perempuan	10 Orang	
JUMLAH		24 Orang	

3. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil berjumlah 2 (dua) Orang, terdiri dari 2 (dua) orang perempuan;

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Penyuluh ASN Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021 Kabupaten Boalemo

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Perempuan	2 Orang	
JUMLAH		2 Orang	

4. Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 3 (tiga) Orang, terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan; dan

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Penyuluh PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021 Kabupaten Boalemo

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki – laki	1 Orang	
2.	Perempuan	2 Orang	
JUMLAH		3 Orang	

5. Penyuluh Perikanan Bantu 4 (empat) Orang, terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Penyuluh Bantu Perikanan Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021 Kabupaten Boalemo

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki – laki	2 Orang	
2.	Perempuan	2 Orang	
JUMLAH		4 Orang	

Komposisi personil diatas tersebar di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sehingga koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dan sistem kerja yang dibangun secara sistematis terutama kerja sama yang baik agar berjalan sesuai dengan harapan.

Jumlah pegawai ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo berdasarkan tingkat pendidikannya, adalah sebagai berikut :

1. Pasca Sarjana (S2) : 1 Orang
2. Sarjana (S1) : 22 Orang
3. Diploma Empat (D4) : 1 Orang
4. Sarjana Muda (D3) : 1 Orang
5. Sarjana Muda (D1) : 1 Orang
6. SLTA/ Sederajat : 10 Orang
7. SLTP/ Sederajat : Orang
8. SD/ Sederajat : Orang

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021
Kabupaten Boalemo

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Magister (S2)	1 Orang	
2.	Sarjana (S1)	23 Orang	
3.	D-III	1 Orang	
4.	SMA	10 Orang	
JUMLAH		36 Orang	

Jumlah penyuluh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo berdasarkan tingkat pendidikannya, adalah sebagai berikut :

1. Sarjana (S1) : 10 Orang
2. Diploma Empat (D4) : 1 Orang
3. Sarjana Muda (D3) : 11 Orang
4. SMA/ Sederajat : Orang
5. SD/ Sederajat : Orang

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai Penyuluh ASN, Penyuluh PPPK dan Penyuluh Bantu Berdasarkan Pendidikan
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021
Kabupaten Boalemo

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Magister (S2)	Orang	
2.	Sarjana (S1)	10 Orang	
3.	D-III	1 Orang	
4.	SMA	Orang	
JUMLAH		11 Orang	

Jumlah pegawai Tenaga Honorer (TPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo berdasarkan tingkat pendidikannya, adalah sebagai berikut :

1. Sarjana (S1) : 10 Orang
2. SLTA/ Sederajat : 12 Orang
3. SLTP/ Sederajat : 2 Orang

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021
Kabupaten Boalemo

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Sarjana (S1)	10 Orang	
2.	SMA	12 Orang	
3.	SLTA	2 Orang	
4.	SD	Orang	
JUMLAH		24 Orang	

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan sebagai Kepala Instansi, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, rata-rata memiliki pendidikan Strata-1. Kondisi tersebut dilihat dari kualitasnya cukup memadai, dan untuk meningkatkan kualitas kemampuan teknis administratif maupun di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo telah mengikut sertakan sejumlah pegawai dalam diklat penjenjangan, diklat kepemimpinan, diklat fungsional serta diklat teknis lainnya. Dengan demikian kualitas pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo baik staf maupun pejabatnya memiliki kemampuan yang memadai dalam menangani urusan perkantoran maupun pengelolaan sektor kelautan di Kabupaten Boalemo.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo dilihat dari pangkat dan golongannya, adalah sebagai berikut :

1. Pembina Utama Muda-IV/c : 1 Orang
2. Pembina-IV/a : 4 Orang
3. Penata Tk. I-III/d : 4 Orang
4. Penata-III/c : 10 Orang
5. Penata Muda Tk.I-III/b : 3 Orang

- 6. Penata Muda-III/a : 2 Orang
- 7. Pengatur Tk. I-II/d : 5 Orang
- 8. Pengatur-II/c : 6 Orang
- 9. Pengatur Muda Tk.I-II/b : 1 Orang
- 10. Pengatur Muda-II/a : Orang

Tabel 1.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021
abupaten Boalemo

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pembina Utama Muda-IV/c	1 Orang	
2.	Pembina-IV/a	4 Orang	
3.	Penata Tk. I-III/d	4 Orang	
4.	Penata-III/c	10 Orang	
5.	Penata Muda Tk.I-III/b	3 Orang	
6.	Penata Muda-III/a	2 Orang	
7.	Pengatur Tk. I-II/d	5 Orang	
8.	Pengatur-II/c	6 Orang	
9.	Pengatur Muda Tk.I-II/b	1 Orang	
JUMLAH		36 Orang	

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo berdasarkan eselonisasi dan jabatan fungsional, adalah sebagai berikut :

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 4 Orang
3. Eselon IV : 8 Orang

Tabel 1.4
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021
Kabupaten Boalemo

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Esselon II	1 Orang	
2.	Esselon III A	4 Orang	
3.	Esselon IV	8 Orang	
JUMLAH		13 Orang	

Berdasarkan jumlah formasi jabatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo memiliki 16 jabatan struktural, dan formasi jabatan tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 telah terisi sebanyak 13 jabatan structural.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo didukung dengan sarana dan prasarana dengan nilai keseluruhan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.960.551.840,00,-

1. Tanah : Rp. 103.194.000,00
2. Peralatan dan Mesin : Rp. 6.229.020.229,00
3. Gedung dan Bangunan : Rp. 5.262.859.190,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 1.835.770.450,00
5. Aset Tetap Lainnya : Rp. 0,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan : Rp. 0,00
7. Akumulasi Penyusutan : (Rp. 16.095.159.819,00)
8. Aset Lain-lain : Rp. 9.651.193.406,00

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo telah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan kondisi saat ini sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor yang memberi kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Boalemo sejak tahun 2017 hingga 2021. Struktur Ekonomi Kabupaten Boalemo tahun 2021 didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar . 55,67 Bahkan dimasa depan, bukan tidak mungkin menjadi *leading sektor*.

Tabel 1 PDRB Dinas Kelautan dan Perikanan

N O	Rincian	Realisasi Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		RP	%	RP	%	RP	%	RP	%	RP	%
1	PDRB	2,490,580	54,93	2,735,500	55,23	3,035,710	56,10	3,064,960	55,81	3,191,880	55,67

2. Nilai Tukar Nelayan pada akhir tahun 2021 mencapai 96.92 Hal ini mengalami kenaikan dari kondisi akhir tahun 2020 sebesar 92,79. Fluktuasi NTN/NTPi ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi, serta kenaikan inflasi.

Tabel 2 Nilai Tukar Nelayan

NO	Rincian	Realisasi Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,86	100,08	101,11	92,79	96.92

3. Produksi perikanan pada tahun 2021 mencapai 24.714 ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 22.625 ton yang diperoleh dari 1.129 unit armada penangkap ikan, serta produksi perikanan budidaya sebesar 2.089 ton yang diperoleh dari 952 rumah tangga perikanan (RTP) perikanan budidaya, dimana pada tahun sebelumnya total produksi perikanan adalah 24.714 ton. Peningkatan produksi perikanan tersebut telah mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam penyediaan protein hewani untuk peningkatan gizi masyarakat.

Tabel 3 Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya

NO	Rincian	Realisasi Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	18.966	21.152	22.090	22.270	22.625
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.123	784,745	1.397	1.818	2.089

4. Konsumsi ikan pada tahun 2021 mencapai 47,25 kg/kapita, hal ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 dimana pada data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tahun 2020 tercatat 44,48 kg/kapita. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) yang rutin dilaksanakan oleh pemerintah dan Kabupaten Boalemo, sebagai sarana promotif edukatif yang dilakukan bersama Tim penggerak PKK untuk mendorong para ibu mengolah ikan menjadi aneka menu masakan serta mempromosikan makan ikan pada masyarakat luas.

Tabel 4. Konsumsi Ikan

NO	Rincian	Realisasi Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Konsumsi Ikan	44,38	42,35	46,30	92,79	47,25

Berdasarkan perkembangan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat bahwa porsi anggaran yang diberikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Boalemo cukup memadai, dan dari segi realisasi terhadap anggaran dimaksud juga sangat baik

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Boalemo

No.	Indikator Kinerja	Target RSPK (Nasional)	Target RK (Supas)	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN PEMUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH																			
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Boalemo.																		
1.1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik																		
1	Persentase Penurunan Jumlah Temuan				0	0	0	0	0	0			0	0	100%			100%	100%
2	Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik				80	80	80	80	80	80	80	80	85	80	100%	100%	100%	106.25%	100%
3	Nilai SARIP OPD				B	B	BB	BB	A	BB	B	BB	BB	A	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Reformasi Birokrasi				45	50	57	68	75						0%	0%	0%	0%	0%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat				3	3.25	3.5	3.75	4	3	3.25	3.5	3.55		100%	100%	100%	89%	0%
1	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Etikok/Pelatihan				60	65	70	75	n/a	87	90	92	80.56	n/a	145.00%	158.46%	131.43%	107.41%	
2	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																			
Peningkatan Agrobisnis Sektor Kelautan dan Perikanan																			
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya																			
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Meningkatkan Hasilnya				22.000	24.200	26.620	26.720	26.820	21.152	22.090	22.270	22.625	26.820	104.01%	109.55%	119.53%	118.10%	100.00%
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang Meningkatkan Hasilnya				1.878	2.066	2.272	2.282	2.300	784.745	1.347	1.705	2.089	2.300	239.31%	147.89%	133.76%	109.24%	100.00%
Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten boalemo																			
1	Rata - rata konsumsi ikan masyarakat				44.67	45.24	46.36	47.36	48.36	42.35	46.30	45.48	47.25	48.36	105.48%	97.71%	101.93%	100.23%	100.00%
1	Nilai Tukar Nelayan				108.09	108.32	108.55	108.78	109.01	100.08	101.11	92.79	96.92	109.01	108.00%	107.13%	116.08%	112.24%	100.00%

Tilamuta, 10 Maret 2022

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOALEMO

Ir. ASRA UMAR MURAT
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19680928 200012 2 006

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kelautan Dan Perikanan
Kabupaten Boalemo

KO DE	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		201 8	201 9	202 0	202 1	202 2	2018	2019	2020	2021	202 2	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2	Angga ran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
	URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG OPD																	
I	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Boalemo.																	
I.1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik																	
2.1 4.0 1	Progra m Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah	339, 590, 000. 00	380, 230, 000. 00	415, 710, 000. 00	438, 750, 000. 00	469, 400, 000. 00	1,476, 552,9 58.00	2,378, 635,3 45.00	988,1 01,73 9.00	975,8 32,20 3.00	-	434. 80%	625. 58%	237. 69%	222. 41%	0.00 %	408,7 36,00 0.00	1,163,82 4,449.00

2.1 4.0 1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
2.1 4.0 1.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																-	-
2.1 4.0 1.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	339,590,000.00	380,230,000.00	415,710,000.00	438,750,000.00	469,400,000.00	1,476,552,958.00	2,378,635,345.00	988,101,739.00	975,832,203.00		434.80%	625.58%	237.69%	222.41%	0.00%	408,736,000.00	5,819,122,245.00
URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG OPD																		
II Peningkatan Agrobisnis Sektor Kelautan dan Perikanan																		
II.1 Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya																		
3.2 5.0 3	Program Pengeluaran Perikanan Tangka	4,337,020.00	4,356,750.00	4,390,000.00	4,405,200.00	4,431,250.00	4,249,691,526.00	6,938,922,760.00	4,146,925,600.00	4,738,725,200.00	-	97.99%	159.27%	94.46%	107.57%	0.00%	4,384,044,000.00	20,074,265,086

	p																	
3.2	Pengelo																	
5.0	laan	4,33	4,35	4,39	4,40	4,43	4,249,	3,186,	3,506,	3,02	-	97.9	73.1	79.8	68.7	0.00	4,384,	13,971,2
3.2.	Penang	7,02	6,75	0,00	5,20	1,25	691,5	630,0	356,9	8,58		9%	4%	7%	5%	%	044,0	63,886
01	kapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.00	60.00	00.00	5,40							00	
	Ikan di	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00								
	Wilayah																	
	Sungai,																	
	Danau,																	
	Waduk,																	
	Rawa,																	
	dan																	
	Genang																	
	an Air																	
	Lainnya																	
	yang																	
	dapat																	
	Diusaha																	
	kan																	
	dalam 1																	
	(satu)																	
	Daerah																	
	Kabupat																	
	en/																	
	Kota																	
3.2	Progra	2,30	2,33	2,35	2,38	2,41	3,016,	1,876,	320,2	855,	-	130.	80.3	13.5	35.8	0.00	2,359,	6,068,05
5.0	m	7,50	3,75	9,75	5,25	0,30	550,5	146,3	84,35	069,		73%	9%	7%	5%	%	310,0	1,134
4	Pengelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.00	50.00	0.00	900.							00	
	laan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				00								
	Perikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	an																	
	Budiday																	

	a																	
3.2	Pengelo											130.	80.3	13.5	35.8	0.00		
5.0	laan	2,30	2,33	2,35	2,38	2,41	3,016,	1,876,	320,2	855,		73%	9%	7%	5%	%	2,359,	6,068,05
4.2.	Pembud	7,50	3,75	9,75	5,25	0,30	550,5	146,3	84,35	069,							310,0	1,134
04	idayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.00	50.00	0.00	900.							00	
	Ikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				00								
II.2 Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten boalemo																		
3.2	Progra											36.0	19.2	12.4	10.4	0.00		
5.0	m	4,33	4,35	4,39	4,40	4,43	1,563,	837,6	546,7	460,	-	4%	3%	5%	5%	%	4,384,	3,407,75
6	Pengola	7,02	6,75	0,00	5,20	1,25	224,0	11,60	47,20	168,							044,0	0,898
	han dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.00	0.00	0.00	000.							00	
	Pemasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				00								
	ran																	
	Hasil																	
	Perikan																	
	an																	
3.2	Penyedi											36.0	19.2	12.4	10.4	0.00		
5.0	aan Dan	4,33	4,35	4,39	4,40	4,43	1,563,	837,6	546,7	460,		4%	3%	5%	5%	%	4,384,	3,407,75
6.2.	Penyalu	7,02	6,75	0,00	5,20	1,25	224,0	11,60	47,20	168,							044,0	0,898
03	ran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.00	0.00	0.00	000.							00	
	Bahan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				00								
	Baku																	
	Industri																	
	Pengola																	
	han																	
	Ikan																	
	Dalam 1																	
	(Satu)																	
	Daerah																	
	Kabupat																	
	en/																	
	Kota																	

TOTAL	11,3	9,09	9,19	9,24	9,33	7,289,	10,15	5,681,	6,17		64.3	111.	61.7	66.7	0.00	40,72	29,301,1
	21,1	3,73	5,71	9,15	1,90	468,5	5,169,	774,5	4,72	-	9%	67%	9%	6%	%	6,100,	38,229
	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	82	705	39	5,40							000	
	00	0	0	0	0				3								

Tilamuta, 10 Maret 2022
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOALEMO



Ir. ASRA UMAR MURAT
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19680928 200012 2 006

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan analisis faktor internal, eksternal, potensi dan permasalahan Kelautan dan Perikanan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan empat tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

- 2.5. Tingginya angka kemiskinan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan.
- 2.6. Dibandang perikanan tangkap, pemerintah dihadapkan pada rendahnya produktivitas dan daya saing usaha yang antara lain disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta keterbatasan dukungan modal;
- 2.7. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan terbatasnya induk dan benih unggul, serangan hama dan penyakit, bahan baku pakan dan tingginya harga pakan ikan, struktur usaha yang masih skala kecil/ tradisional, penyediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitasi optimalisasi kolam, tambak yang terbatas, keterbatasan permodalan, teknologi dan pasar. Disamping itu, terdapat tantangan alam dan potensi bencana alam (banjir) yang sering terjadi. Bencana alam banjir seringkali menimbulkan kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat yang merusakkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- 2.8. Pada aspek pengolahan hasil perikanan masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung persyaratan mutu produk olahan hasil perikanan dimana masih banyak praktek pengolahan ikan yang kurang higienis, serta minimnya diverifikasi produk hasil perikanan akibat lemahnya akses teknologi dan permodalan. Selain itu ancaman akan masuknya produk impor melalui pasar bebas juga patut diperhitungkan.

Adapun peluang yang mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan empat tahun ke depan antara lain:

1. Adanya upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting;

2. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap produksi kelautan dan perikanan. Selain itu adanya globalisasi ekonomi semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor. Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlunya didukung munculnya usaha-usaha kelautan dan perikanan baru yang inovatif, produktif dan tanggap terhadap kebutuhan pasar.
3. Potensi perikanan tangkap dan budidaya yang masih sangat besar, serta peningkatan permintaan akan produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas dan produk perikanan;
4. Adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan perikanan dan kelautan.



PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pelaksanaan pembangunan perikanan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kurun waktu tahun 2023-2026 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan Kabupaten Boalemo antara lain, yakni :

1. Sebagian besar nelayan di Kabupaten Boalemo masih dikategorikan masyarakat miskin yang antara lain disebabkan karena skala usaha penangkapan yang dilakukan masih bersifat tradisional yaitu menggunakan perahu motor berkapasitas kecil dengan kemampuan *one day fishing*, sehingga terbatas pada perairan pantai yang sudah berkurang sumberdaya ikannya.
2. Dukungan sarana dan prasarana khususnya perikanan tangkap yang belum memadai guna memenuhi kebutuhan nelayan dalam mengeksplorasi sumberdaya perikanan serta jumlah SDM Aparatur yang melayani operasional sarana/prasarana dan pembinaan dalam bidang Usaha Kelautan dan Perikanan.
3. Terbatasnya daya dukung sarana dan prasarana (mencakup benih, bibit, pakan, sarpras produksi) serta teknologi budidaya perikanan sehingga usaha pembudidayaan ikan yang dijalankan masih tergolong tradisional. Kondisi tersebut menyebabkan produksi yang dihasilkan kurang produktif dan belum optimal. Disamping adanya serangan hama dan penyakit ikan.
4. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu yaitu penanganan yang higienis merupakan salah satu permasalahan dalam rangka peningkatan mutu hasil pengolahan perikanan, disamping itu belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir.

Tabel T-B. 35
Permasalahan dan Isu - isu Strategis
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Boalemo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Sebagian besar nelayan di Kabupaten Boalemo belum memahami pola penangkapan ikan lebih moderen	Kurangnya peningkatan kompetensi bagi pengelola kelompok nelayan dari lintas sektor	Keterbatasan porsi anggaran yang di alokasikan terhadap peningkatan kompetensi bagi pengelola kelompok nelayan
		Dukungan sarana dan prasarana khususnya perikanan tangkap yang belum memadai Dalam mengeksplorasi sumberdaya perikanan serta jumlah SDM Aparatur yang melayani operasional sarana/prasarana dan pembinaan dalam bidang Usaha Kelautan dan Perikanan	Keterbatasan Sarana dan Prasarana khususnya perikanan Tangkap
2	Rendahnya produktifitas perikanan budidaya dan belum memilikinya Balai Benih Ikan dalam upaya penyediaan induk ikan dan benih ikan unggul	Terbatasnya daya dukung sarana dan prasarana (mencakup benih, bibit, pakan, sarpras produksi) serta teknologi budidaya perikanan sehingga usaha pembudidayaan ikan yang dijalankan masih tergolong tradisional. Kondisi tersebut menyebabkan produksi yang dihasilkan kurang produktif dan belum optimal. Disamping adanya serangan hama dan penyakit ikan	Keterbatasan Sarana dan Prasarana produksi serta balai benih ikan

3	Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu yaitu penanganan yang higienis merupakan salah satu permasalahan dalam rangka peningkatan mutu hasil pengolahan perikanan, disamping itu belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir	kurangnya pembinaan dan bimbingan pengolahan hasil perikanan dan rendahnya sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi pengolahan ikan	Minimnya pendidikan dan pelatihan serta dukungan anggaran
		kurangnya pertumbuhan sentra pengolahan perikanan baik skala rumah tangga maupun skala besar	Keterbatasan sarana dan prasarana pada industri pengolahan hasil perikanan baik berskala kecil maupun besar serta minimnya pengembangan dan investasi usaha kelautan dan perikanan

Tilamuta, 10 Maret 2022
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOALEMO



Ir. ASRA UMAR MURAD
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19680928 200012 2 006

3.2. TELAHAH TUJUAN SASARAN RPD KABUPATEN BOALEMO

Penentuan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2011-2025 merupakan Kebijakan Utama Rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Boalemo tahun 2023-2026. Tujuan dan sasaran diformulasikan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis,. Sedangkan Penentuan Tujuan dan Sasaran telah mempertimbangkan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini nantinya dapat menjadi acuan untuk melihat pencapaian pada akhir masa Rencana Pembangunan Daerah.

➤ Peningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Daerah Kabupaten Boalemo sebagian besar bertumpu pada kegiatan Agribisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pengelolaan sumberdaya agribisnis yang diharapkan mampu mewujudkan peningkatan perekonomian boalemo

yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi di bidang agribisnis diharapkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di bidang agribisnis meningkat.

Selain sektor agribisnis, peningkatan ekonomi bersumber dari potensi sumberdaya alam lainnya yaitu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan mampu berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian. Pembangunan perekonomian harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang relevan.

Tujuan dari peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat dijabarkan oleh sasaran berikut ini :

- Meningkatnya agribisnis, peran kelembagaan ekonomi masyarakat dan kualitas sumber daya produktif daerah
- Meningkatnya pembangunan suprastruktur, infrastruktur, dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian dan pelayanan dasar serta konektivitas Boalemo dengan daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dan di daerah teluk tomini

➤ **Sasaran Ekonomi Makro**

Kinerja keberhasilan pembangunan diukur berdasarkan sasaran indikator makro pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boalemo mulai tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan yaitu dari 6,66% pada tahun 2017 menjadi 6,7% pada tahun 2018, dan 6,7% pada tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2019 sampai dengan 2020, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan yaitu berada pada posisi -0,21%.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi makro di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB dapat memberikan gambaran tentang kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah tersebut. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Perekonomian Kabupaten Boalemo pada tahun 2020 yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 5.410,9 milyar, meningkat pada tahun 2021 yang sebesar Rp. 5.491,21 milyar. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020 besarnya mencapai Rp. 3.504,23 milyar, menurun pada tahun 2021 yang sebesar Rp. 3496.7milyar.

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara

PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Tahun 2020, pendapatan perkapita sebesar Rp. 20.403.690,- per tahun.

Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator sasaran ekonomi makro. Semakin rendah tingkat pengangguran terbuka maka semakin tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini dapat menaikkan daya beli masyarakat sehingga mampu mendorong perputaran perekonomian di Boalemo. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan mencapai 1281 orang dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 652 orang. penambahan jumlah pengangguran terbuka ini tidak lepas dari mewabahnya pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia di awal tahun 2020 yang berdampak pada mata pencarian masyarakat. Penduduk miskin Kabupaten Boalemo pada tahun 2021 berjumlah 31.830 orang atau 19,00 %, jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan penduduk miskin pada 2020 yang berjumlah 31.630 orang atau 18,57%. Kenaikan penduduk miskin ini tidak lepas dari pandemi Corona Disease yang melanda Indonesia yang dimulai pada tahun 2020. Imbas pandemi Corona Disease tentu memiliki dampak berantai terhadap seluruh kegiatan perekonomian masyarakat, seperti kegiatan perekonomian yang mengalami penurunan intensitas. Hal inilah yang membuat inflasi tinggi dan daya beli masyarakat menurun.

3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DAN RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

Analisis Renstra Kemantrian Lembaga dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaannya dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo. Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Untuk itu perlu pelaksanaan konsep *blue economy* dalam pemanfaat dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan *blue economy* tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan *blue economy* perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disertai upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah (1) melindungi, mengoservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan, (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir

dan pulau-pulau kecil. Mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun-tahun sebelumnya, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan. Untuk itu, KKP mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan, dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui industrialisasi, para Masyarakat Kelautan dan Perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dengan demikian, industrialisasi perikanan diharapkan mampu mengokohkan struktur Usaha Kelautan dan Perikanan nasional, yang membawa *multiplier effect* dan sebagai *prime mover* perekonomian nasional. Disamping itu, KKP telah melaksanakan beberapa kebijakan baru yakni Program Peningkatan Kehidupan Nelayan yang merupakan dari Masterplan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 3 Koridor Ekonomi yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo. Dibandingkan dengan struktur dan pola eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan Kelautan dan Perikanan, perkiraan kebutuhan pelayanan Kelautan dan Perikanan, dan prioritas wilayah pelayanan Kelautan dan Perikanan dalam empat tahun mendatang. Sehingga rancangan program beserta targetnya dapat disusun sesuai dengan RTRW tersebut.

Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis terlihat bahwa pola penggunaan dan pemanfaatan kawasan dititik beratkan pada konsep agribisnis perikanan yang terdiri dari sub-sistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri dan

perdagangan sarana produksi perikanan, sub-sistem budidaya/penangkapan (*on-farm agribusiness*) yang menghasilkan komoditas perikanan, sub-sistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan pemasaran, dan sub-sistem jasa penunjang (*supporting institution*) yang mendukung pengembangan semua sub-sistem, meliputi : perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan, dan lain-lain. Semua sub-sistem berada dalam simpul keterkaitan fungsional yang saling mendukung dalam eksistensi sistem yang terpadu dalam berakselerasi mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Struktur tata ruang menentukan kualitas interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan sebuah kawasan berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Untuk mengintegrasikan titik-titik ruang, maka dibuat struktur ruang berdasarkan fungsinya masing-masing. Secara garis besar, rencana struktur ruang Kawasan Minapolitan di Kabupaten/Kota terdiri atas beberapa orde, yaitu : Pusat Satuan Kawasan Perikanan, Pusat Distrik Minapolitan (pusat pertumbuhan), Kota Tani Utama/Minapolis (sentra produksi), wilayah-wilayah hinterland, dan kota pemasaran (*outlet*).

Mengacu kepada penajaman pembangunan daerah maka perspektif tujuan telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan dan industrialisasi dengan mengakselerasi pencapaian visi pembangunan nasional dan daerah.

Rencana Struktur Tata Ruang menentukan interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, secara garis besar rencana struktur ruang kawasan minapolitan di kabupaten/kota terdiri atas : Pusat satuan kawasan perikanan, pusat distrik minapolitan (pusat pertumbuhan), kota minapolis (Sentra produksi), wilayah-wilayah *hinterland*, dan kota pemasaran (*outlet*). Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031, Rencana pengembangan kawasan strategis nasional dan kawasan budidaya nasional dengan sektor unggulan Perikanan meliputi :

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Boalemo pada umumnya terpencar di beberapa wilayah kecamatan. Adapun kawasan peruntukan perikanan meliputi :

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap dikembangkan di wilayah pesisir dan laut yang terdiri dari Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman dan Paguyaman Pantai.
- Kawasan peruntukan budidaya perikanan yaitu :
 - Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar terdapat di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman dan Wonosari.

- Kawasan peruntukan budidaya perikanan laut dan perikanan air payau dengan luas 180,95 ha terdapat di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi dan Paguyaman Pantai; dan
- Budidaya rumput laut di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Dulupi, dan Paguyaman Pantai seluas 1,509.70 Ha

Kawasan pengolahan hasil perikanan yaitu pengembangan minapolitan di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman dan Paguyaman Pantai didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang dapat menunjang kegiatan usaha perikanan. Peningkatan Sumber Daya Lahan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, wilayah Kabupaten Boalemo, terdiri atas:

- a. Mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah di perdesaan;
- b. Meningkatkan kualitas lahan pertanian;
- c. Mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan khususnya di daerah perdesaan seluruh kabupaten secara selektif;
- d. Meningkatkan intensitas budidaya peternakan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan air tawar;
- f. Mengembangkan budidaya perikanan air tawar, air payau dan laut.
- g. Mengembangkan komoditas perikanan dilakukan secara luas oleh masyarakat maupun badan usaha yang diberi izin di wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah setempat. dan
- h. Mengembangkan sektor perikanan yang terpadu dengan kegiatan wisata serta memenuhi kebutuhan kawasan lain di luar wilayah.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) lebih terfokus pada upaya untuk mewujudkan perekonomian melalui pengembangan agribisnis secara terpadu dan kompetitif dengan membangun sistem produksi, distribusi dan pemasaran termasuk pelayanan jasa. Pengembangan agribisnis tersebut bertumpu pada kompetensi inti daerah yakni pertanian secara umum, perikanan dan kelautan, kehutanan dan pertambangan dan energi, industri pengolahan, dan pariwisata. secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan ekonomi Boalemo juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi dan usaha kecil menengah), optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan

kualitas SDM di sektor inti daerah, penyederhanaan sistem, prosedur dan birokrasi di bidang ekonomi, peningkatan konektivitas ekonomi Boalemo dengan daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dan di daerah teluk tomini. Dinas Kelautan dan Perikanan menitik beratkan pada 3 (tiga) kegiatan yakni peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya dan peningkatan konsumsi ikan. Namun dalam pencapaian program / kegiatan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

1. Musim
2. Keahlian nelayan
3. Kurangnya pemahaman nelayan tentang teknik penangkapan ikan
4. Nelayan masih menggunakan sarana / prasarana yang tidak sesuai dengan aturan
5. Keterbatasan sarana / prasarana
6. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dari ikan
7. Kurangnya stok pakan sehingga produksi perikanan budidaya menurun
8. Belum memiliki Balai Benih ikan air tawar dan ikan air payau



TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai empat tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo selama tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Pengembangan sektor perikanan diarahkan pada pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan serta berorientasi pada peningkatan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan tujuan dinas ditetapkanlah sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik
2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
3. Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten boalemo.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada Tabel T-C25 berikut :

Tabel T-C25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Formula pengukuran	Satuan	Kondisi Awal 2021	Proyeksi				
								2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Perekonomian Boalemo yang Handal dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo	Indeks Reformasi Birokrasi			Hasil Review Pan RB	Nilai	n/a	57	57	60	63	66
			Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	Hasil Evaluasi SAKIP	Predikat	n/a	B	B	BB	BB	A
				Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti : total temuan OPD tahun berjalan x 100	Persen	n/a	100	100	100	100	100

			Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah BMD dalam kondisi baik : Jumlah Total BMD x 100	Persen	n/a	80	80	80	80	80
			Jumlah Penerimaan PAD (khusus OPD pemungutan PAD) (juta)	Total realisasi PAD setahun	Dokumen	n/a	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
			Presentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis : total jumlah ASN x 100	Persen	n/a	25	25	30	35	40

Peningkatan Agrobisnis Sektor Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang Meningkat			Indeks yang diterima (it)	%	96,92	96,93	97.89	98.87	99.86	100.86
				Indeks yang dibayar (ib) X 100							
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Meningkat Hasilnya	$Produksi\ Tangkap = \sum Produksi\ Bulanan\ (1-12)$	Ton	22,625	26,820	27,088	27,359	27,632	27,908
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang Meningkat Hasilnya	$Produk\ si\ Budidaya = \sum Produk\ si\ Bulanan\ (1-12)$	Ton	2,089	2,300	2,323	2,346	2,369	2,393
		Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten	Rata – rata konsumsi ikan masyarakat	$Produk\ si\ ikan\ (tangkap + budidaya) - Volume\ pemasaran\ (eksport +$	Kg/Kapita/Thn	47,25	44.67	45.24	46.36	47.36	48.36

			boalemo		losses)							
					Jumlah Pendud uk							



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang cukup relevan, cepat, tepat dan akurat serta analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo.

Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan (umum) yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel T-C.26						
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan						
Tujuan RPD : Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat						
Sasaran RPD : Meningkatnya Agrobisnis, Peran Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Produktif Daerah						
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Tujuan : 1		Sasaran : 1.1				
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1.1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan	1.1	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik	1.1	Peningkatan Sistem Pelayanan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo		publik				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Tujuan : 2		Sasaran : 2.1				
Peningkatan Agrobisnis Sektor Kelautan dan Perikanan	2.1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	2.1	* Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.1	* Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Pengembangan Akses Bagi Nelayan terhadap Informasi dan Permintaan Pasar	2.1	Peningkatan Kemampuan Nelayan dalam meningkatkan Produksi yang Berkualitas guna memperoleh Nilai jual yang Tinggi
				Meningkatkan sarana dan prasarana penangkapan ikan		Pennyyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan
						Peningkatan Kelembagaan teknologi penangkapan ikan
			2.1.2	* Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.1.2	* Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta peningkatan sapras perbenihan		Peningkatan kelembagaan dan pengenalan teknologi budidaya
						Peningkatan sapras budidaya
	2.2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten boalemo	2.2	Memberikan Pendampingan dan Pembinaan Kepada Nelayan	2.2	Memberikan Bantuan Berupa Sarana Prasarana
				Memfasilitasi Nelayan untuk Mendapatkan Modal (UMKM)		Peningkatan Kelembagaan Usaha Hasil Perikanan

			Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi ikan masyarakat (sosial, budaya, ekonomi)		Peningkatan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			Mendekatkan ikan segar yang bermutu baik kepada masyarakat		Pengembangan produk olahan
					Pengenalan ragam produk olahan dengan media yang tepat



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Arah kebijakan dan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo tahun 2023-2026 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program serta kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

2.8.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkupdan operasional rutin/ rumah tangga SOPD. Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan dan sub kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.8.2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2.8.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2.8.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.8.5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 2.8.6. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2.8.7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 2.8.8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.8.9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.8.10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.8.11. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2.8.12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2.8.13. Pengadaan Mebel
- 2.8.14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2.8.15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.8.16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2.8.17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.8.18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.8.19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.8.20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2.8.21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2.8.22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - 2.8.23. Pemeliharaan Mebel
 - 2.8.24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2.8.25. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 2.8.26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 2.8.27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2.8.28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk pengembangan usaha perikanan tangkap di laut. Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan dan sub kegiatan :

- a) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- 2.8.29. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- 2.8.30. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- 2.8.31. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

- b) Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.8.32. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - 2.8.33. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Nelayan Kecil
 - 2.8.34. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- c) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - 2.8.35. Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - 2.8.36. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- d) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.8.37. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
 - 2.8.38. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
- e) Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2.8.39. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
 - 2.8.40. Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
- f) Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.8.41. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
 - 2.8.42. Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan dari hasil budidaya ikan. Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan dan sub kegiatan :

- a) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.8.43. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang budidaya Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

- b) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

2.8.44. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

2.8.45. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

2.8.46. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

2.8.47. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

- c) Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

2.8.48. Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- d) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

2.8.49. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.8.50. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

2.8.51. Perencanaan, dan Pengembangan, Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

3. Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Program ini diarahkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan dan sub kegiatan :

- a) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

2.8.52. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas produksi hasil olahan perikanan. Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan dan sub kegiatan :

- a) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil

2.8.53. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- b) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

2.8.54. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- c) Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2.8.55. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.8.56. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

T-C.27

**Rencana Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Boalemo. Provinsi Gorontalo**

TUJUAN	SASARAN	KO DE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Kepmen 50	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA										Target Kinerja Capaian Akhir Renstra		Tar get Ak hir Re nst ra
					Kon disi Awa l Rens tra (202 2)		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.2 5			URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG PEMERITAHAN DAERAH														
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik																

		1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Kelautan dan Perikanan	100%		100%	3,950,340,700.00	100%	3,950,340,700.00	100%	3,950,340,700.00	100%	3,950,340,700.00	
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	-	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	

1.03 .01. 2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		8 Dokumen	10,000, 000	11 Dokumen	10,000, 000	8 Dokumen	10,00 0,000	8 Dokumen	10,000, 000	8 Dokumen	10,00 0,000	
1.03 .01. 2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	40,000, 000	5 Laporan	40,000, 000	5 Laporan	40,00 0,000	5 Laporan	40,000, 000	5 Laporan	40,00 0,000	

1.03 .01. 2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Douk men	-	4 Lapor an	20,000, 000	4 Lapor an	20,000, 000	4 Lapo ran	20,00 0,000	4 Lapor an	20,000, 000	4 Lapo ran	20,00 0,000
1.04 .01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persenta se Adminis trasi Keuanga n yang tepat waktu	100%		100%	3,176,5 31,269. 00	100%	3,176,5 31,269. 00	100 %	3,176, 531,2 69.00	100%	3,176,5 31,269. 00	100 %	3,176, 531,2 69.00

1.04 .01. 2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang		36 Orang	3,176,5 31,269. 00	36 Orang	3,176,5 31,269. 00	36 Orang	3,176, 531,2 69.00	36 Orang	3,176,5 31,269. 00	36 Orang	3,176, 531,2 69.00	
1.04 .01. 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan perangkat daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	150,00 0,000	12 Dokumen	150,00 0,000	12 Dokumen	150,0 00,00 0	12 Dokumen	150,00 0,000	12 Dokumen	150,0 00,00 0	
1.04 .01. 2.04 .04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	150,00 0,000	12 Dokumen	150,00 0,000	12 Dokumen	150,0 00,00 0	12 Dokumen	150,000 ,000	12 Dokumen	150,0 00,00 0	
1.03 .01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	100%		100%	31,000, 000	100%	31,000, 000	100 %	31,00 0,000	100%	31,000, 000	100 %	31,00 0,000	

1.03 .01. 2.05 .02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikut i Bimbinga n Teknis Impleme ntasi Peratura n Perunda ng- Undanga n Persenta se tersedian ya Peralatan dan Perlengk apan Kantor	1 Paket		70 Paket	21,000, 000	70 Paket	21,000, 000	70 Pake t	21,00 0,000	70 Paket	21,000, 000	70 Pake t	21,00 0,000	
1.03 .01. 2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikut i Bimbinga n Teknis Impleme ntasi Peratura n	3 Orang		2 Orang	10,000, 000	2 Orang	10,000, 000	2 Oran g	10,00 0,000	2 Orang	10,000, 000	2 Oran g	10,00 0,000	

		Perunda ng- Undanga n Persenta se tersedian ya Peralatan dan Perlengk apan Kantor													
1.03 .01. 2.06	Administras i Umum Perangkat Daerah	Persenta se peralata n kerja yang berfungs i dengan baik	100%		100%	211,00 0,000	100%	211,00 0,000	100 %	211,0 00,00 0	100%	211,00 0,000	100 %	211,0 00,00 0	
1.03 .01. 2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an	1 Paket		1 Paket	25,000, 000	1 Paket	25,000, 000	1 Pake t	25,00 0,000	1 Paket	25,000, 000	1 Pake t	25,00 0,000	

1.03 .01. 2.06 .09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	1 Lapor an		1 Lapor an	186,00 0,000	1 Lapor an	186,00 0,000	1 Lapo ran	186,0 00,00 0	1 Lapor an	186,000 ,000	1 Lapo ran	186,0 00,00 0	
1.03 .01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persenta se ketersed iannya Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah di Opd	100%		100%	100,00 0,000	100%	100,00 0,000	100 %	100,0 00,00 0	100%	100,00 0,000	100 %	100,0 00,00 0	
1.03 .01. 2.07 .01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Disediak	1 Unit		1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000, 000	1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000, 000	

		an													
1.03 .01. 2.07 .02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	50,000, 000	1 Unit	50,000, 000	1 Unit	50,00 0,000	1 Unit	50,000, 000	1 Unit	50,00 0,000	
1.03 .01. 2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000, 000	1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000, 000	
1.03 .01. 2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	20,000, 000	1 Unit	20,000, 000	1 Unit	20,00 0,000	1 Unit	20,000, 000	1 Unit	20,00 0,000	
1.03 .01. 2.07 .11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau	1 Unit		1 Unit	20,000, 000	1 Unit	20,000, 000	1 Unit	20,00 0,000	1 Unit	20,000, 000	1 Unit	20,00 0,000	

	Kantor atau Bangunan Lainnya	Banguna n Lainnya yang Disediak an													
1.03 .01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persenta se Ketersed iaan Jasa Penujan g Urusan Pemerin tah Daerah di OPD	100%		100%	166,80 9,431	100%	166,80 9,431	100 %	166,8 09,43 1	100%	166,80 9,431	100 %	166,8 09,43 1	
1.03 .01. 2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat	1 Lapor an		1 Lapor an	5,000,0 00	1 Lapor an	5,000,0 00	1 Lapo ran	5,000, 000	1 Lapor an	5,000,0 00	1 Lapo ran	5,000, 000	
1.03 .01. 2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an	1 Lapor an		1 Lapor an	90,000, 000	1 Lapor an	90,000, 000	1 Lapo ran	90,00 0,000	1 Lapor an	90,000, 000	1 Lapo ran	90,00 0,000	

1.03 .01. 2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Peralatan dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an	1 Lapor an		1 Lapor an	51,809, 431	1 Lapor an	51,809, 431	1 Lapo ran	51,80 9,431	1 Lapor an	51,809, 431	1 Lapo ran	51,80 9,431
1.03 .01. 2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediak an	1 Lapor an		1 Lapor an	20,000, 000	1 Lapor an	20,000, 000	1 Lapo ran	20,00 0,000	1 Lapor an	20,000, 000	1 Lapo ran	20,00 0,000
1.03 .01. 2.09	Pemeliharaa an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di Daerah	Persenta se Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah di OPD dalam kondisi	100%		100%	45,000, 000	100%	45,000, 000	100 %	45,00 0,000	100%	45,000, 000	100 %	45,00 0,000

		baik													
1.03 .01. 2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	
1.03 .01. 2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	1 Unit		1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	

		nya													
1.03 .01. 2.09 .04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihar a dan Dibayark an Perizinan nya	1 Unit		1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000, 000	1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000, 000	
1.03 .01. 2.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihar a	1 Unit		1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000, 000	1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000, 000	
1.03 .01. 2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar a	1 Unit		1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000, 000	1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000, 000	
1.03 .01. 2.09	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	1 Unit		1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000, 000	1 Unit	5,000,0 00	1 Unit	5,000, 000	

	.07		Lainnya yang Dipelihara													
	1.03 .01. 2.09 .09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	
	1.03 .01. 2.09 .10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		100%	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	
	1.03 .01. 2.09 .11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit		100%	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	

				Lainnya yang Dipelihara a/ Direhabilitasi													
		01.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Peningkatan Agrobisnis Sektor Kelautan dan Perikanan																	
	Meningkatnya agribisnis secara terpadu dan kompetitif																
		3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Meningkatkan Hasilnya	26.820 Ton	3,978,932,000	27.088 ton	2,077,994,100	27.359 Ton	2,095,320,600.00	27.632 Ton	2,113,080,200.00	27.908 Ton	2,131,283,800.00	27.908 Ton	2,131,283,800.00	
		3.25.03.2.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1	Persentase Penyediaan sarana dan prasana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah	100%	3,978,932,000	100%	1,327,994,100.00	100%	1,345,320,600.00	100%	1,363,080,200.00	100%	1,381,283,800.00	100%	1,381,283,800.00	

	(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genanga n Air Lainnya													
3.25 .03. 2.01 .01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupate n/Kota yang Tersedia	1 Doku men		1 Doku men	200,00 0,000	1 Doku men	200,00 0,000	1 Dok ume n	200,0 00,00 0	1 Doku men	200,000 ,000	1 Dok ume n	20 0,0 00, 00 0	
3.25 .03. 2.01 .02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasaran a Usaha Perikana n Tangkap	15 Unit	2,15 1,59 7,00 0	20 Unit	513,99 7,071	25 Unit	524,74 4,821	30 Unit	525,7 61,26 4	35 Unit	527,053 ,119	35 Unit	52 7,0 53, 11 9	
3.25 .03. 2.01 .03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikana n Tangkap yang	15 Unit	1,82 7,33 5,00 0	20 Unit	613,99 7,029.0 0	25 Unit	620,57 5,779.0 0	30 Unit	637,3 18,93 6.00	35 Unit	654,230 ,681.00	35 Unit	65 4,2 30, 68 1.0 0	

		Terjamin dan Tersedia													
3.25 .03. 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitasi dan pengembangan lembaga usaha kelompok nelayan kecil yang terbentuk	20%		20%	150,000,000	25%	150,000,000	30%	150,000,000	35%	150,000,000	40%	150,000,000	
3.25 .03. 2.02 .01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang		20 Orang	50,000,000	20 Orang	50,000,000	20 Orang	50,000,000	20 Orang	50,000,000	20 Orang	50,000,000	
3.25 .03. 2.02 .02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi	3 Kelompok		3 Kelompok	50,000,000	3 Kelompok	50,000,000	3 Kelompok	50,000,000	3 Kelompok	50,000,000	3 Kelompok	50,000,000	

		si Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya													
3.25 .03. 2.02 .03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan PenDanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	50,000,000	2 Unit Usaha	50,000,000	2 Unit Usaha	50,000,000	2 Unit Usaha	50,000,000	2 Unit Usaha	50,000,000	50,000,000	
3.25 .03. 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	100%	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	150,000,000	

3.25 .03. 2.03 .01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen		1 Dokumen	50,000, 000	1 Dokumen	50,000, 000	1 Dokumen	50,00 0,000	1 Dokumen	50,000, 000	1 Dokumen	50, 00 0,0 00	
3.25 .03. 2.03 .02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 Layanan		3 Layanan	100,00 0,000	3 Layanan	100,00 0,000	3 Layanan	100,0 00,00 0	3 Layanan	100,000 ,000	3 Layanan	10 0,0 00, 00 0	
3.25 .03. 2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Persentase Penetapan dan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan	100%		100%	150,00 0,000	100%	150,00 0,000	100%	150,0 00,00 0	100%	150,00 0,000	100%	15 0,0 00, 00 0	

	yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya													
3.25 .03. 2.04 .01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyarat an dan Prosedur Penerbita n Rekomen dasi Perizinan Berusaha Perikana n Tangkap yang Menjadi Kewenan gan Kabupate n/ Kota	1 Doku men		1 Doku men	50,000, 000	1 Doku men	50,000, 000	1 Dok ume n	50,00 0,000	1 Doku men	50,000, 000	1 Dok ume n	50, 00 0,0 00	

3.25 .03. 2.04 .02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomen dasi Tanda Daftar Kapal Perikana n	1 Reko mend asi	1 Reko mend asi	100,00 0,000	1 Reko mend asi	100,00 0,000	1 Reko men dasi	100,0 00,00 0	1 Reko mend asi	100,000 ,000	1 Reko men dasi	10 0,0 00, 00 0	
3.25 .03. 2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT diWilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/	Persenta se Penerbit an Izin Pengada an Kapal Penangk ap Ikan dan Kapal Pengang kut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT diWilaya h Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genanga n Air Lainnya	100%	100%	150,00 0,000	100%	150,00 0,000	100 %	150,0 00,00 0	100%	150,00 0,000	100 %	15 0,0 00, 00 0	

	Kota														
3.25 .03. 2.05 .01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan	1 Dokumen		1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	

3.25 .03. 2.05 .02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	1 Reko mend asi		1 Reko mend asi	100,00 0,000	1 Reko mend asi	100,00 0,000	1 Reko mend asi	100,0 00,00 0	1 Reko mend asi	100,000 ,000	1 Reko mend asi	10 0,0 00, 00 0	
3.25 .03. 2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	100%		100%	150,00 0,000	100%	150,00 0,000	100 %	150,0 00,00 0	100%	150,00 0,000	100 %	15 0,0 00, 00 0	

		Lainnya													
3.25 .03. 2.06 .01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyarat an dan Prosedur Penerbita n Rekomen dasi Buku Kapal Perikana n yang Menjadi Kewenan gan Kabupate n/Kota	1 Doku men		1 Doku men	50,000, 000	1 Doku men	50,000, 000	1 Dok ume n	50,00 0,000	1 Doku men	50,000, 000	1 Dok ume n	50, 00 0,0 00	
3.25 .03. 2.06 .02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomen dasi Buku Kapal Perikana n (BKP) yang Diterbitk an	1 Reko mend asi		1 Reko mend asi	100,00 0,000	1 Reko mend asi	100,00 0,000	1 Reko men dasi	100,0 00,00 0	1 Reko mend asi	100,000 ,000	1 Reko men dasi	10 0,0 00, 00 0	
3.25 .04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produks i perikana	2.300 Ton		2.323 Ton	2,020,7 96,550	2.346 Ton	2,037,6 46,050	2.36 9 Ton	2,054, 916,8 50	2.393 Ton	2,072,6 19,400. 00	2.39 3 Ton	2,0 72, 61	

		n budiday a yang meningk at hasilnya												9,4 00	
3.25 .04. 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudiday aan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persenta se Penerbit an Izin Usaha Perikan an di Bidang Pembudi dayaan Ikan	100%		100%	130,00 0,000	100%	130,00 0,000	100 %	130,0 00,00 0	100%	130,00 0,000	100 %	13 0,0 00, 00 0	
3.25 .04. 2.01 .02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang budidaya an Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/	Jumlah Rekomen dasi Perizinan Berusaha Perikana n Bidang Pembudi dayaan Ikan yang Usahanya , Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak	55 Doku men		65 Doku men	130,00 0,000	70 Doku men	130,00 0,000	75 Dok ume n	130,0 00,00 0	80 Doku men	130,000 ,000	80 Dok ume n	13 0,0 00, 00 0	

	Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan													
3.25 .04. 2.02	Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Persentase penyediaan Prasarana	100%		100%	520,000,000	100%	520,000,000	100%	520,000,000	100%	520,000,000	100%	520,000,000	

		Pembudi daya ikan													
3.25 .04. 2.02 .01	Pengembang an Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompo k Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikut i Pengemb angan Kapasitas	10 Kelom pok		10 Kelom pok	130,00 0,000	10 Kelom pok	130,00 0,000	10 Kelo mpo k	130,0 00,00 0	10 Kelom pok	130,000 ,000	10 Kelo mpo k	13 0,0 00, 00 0	
3.25 .04. 2.02 .02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembang an Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompo k Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikut i Pembent ukan dan Pengemb angan Kelemba gaan	10 Kelom pok		10 Kelom pok	130,00 0,000	10 Kelom pok	130,00 0,000	10 Kelo mpo k	130,0 00,00 0	10 Kelom pok	130,000 ,000	10 Kelo mpo k	13 0,0 00, 00 0	

3.25 .04. 2.02 .03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompo k Usaha yang terfasilita si Bantuan Pendana an, Bantuan Pembiay aan, Kemitraa n Usahanya	10 Kelom pok		10 Kelom pok	130,00 0,000	10 Kelom pok	130,00 0,000	10 Kelo mpo k	130,0 00,00 0	10 Kelom pok	130,000 ,000	10 Kelo mpo k	13 0,0 00, 00 0	
3.25 .04. 2.02 .04	Pemberian Pendampinga n, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggar aan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompo k Usaha yang Mempero leh Pendamp ingan, Kemudah anan Akses Ilmu Pengetah uan, Teknolog i dan Informasi , Serta Penyelen ggaraan	10 Kelom pok		10 Kelom pok	130,00 0,000	10 Kelom pok	130,00 0,000	10 Kelo mpo k	130,0 00,00 0	10 Kelom pok	130,000 ,000	10 Kelo mpo k	13 0,0 00, 00 0	

		Pendidikan dan Pelatihan													
3.25 .04. 2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Fasilitas penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	100%		100%	130,000,000	100%	130,000,000	100%	130,000,000	100%	130,000,000	100%	130,000,000	130,000,000
3.25 .04. 2.03 .02	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen		20 Dokumen	130,000,000	30 Dokumen	130,000,000	40 Dokumen	130,000,000	50 Dokumen	130,000,000	50 Dokumen	130,000,000	130,000,000

3.25 .04. 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100%		100%	1,240,796,550.00	100%	1,257,646,050.00	100%	1,274,916,850.00	100%	1,292,619,400.00	100%	1,292,619,400.00	
3.25 .04. 2.04 .02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Paket		12 Paket	395,398,275	14 Paket	405,490,662	16 Paket	415,835,359	18 Paket	426,438,674	18 Paket	426,438,674	
3.25 .04. 2.04 .03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	10 Paket		12 Paket	595,398,275	14 Paket	602,155,388	16 Paket	609,081,491.00	18 Paket	616,180,726.00	18 Paket	616,180,726.00	

3.25.04.2.04.06	Perencanaan, dan Pengembangan, Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudi daya Ikan yang Mengikut i Perencanan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudi dayaan Ikan di Darat	10 Kelompok		12 Kelompok	250,000,000	14 Kelompok	250,000,000	16 Kelompok	250,000,000	18 Kelompok	250,000,000	18 Kelompok	250,000,000	250,000,000
3.25.05	Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penurunan angka pelanggaran	100%		100%	100,000,000.00	100%	100,833,800.00	100%	101,688,450.00	100%	102,564,450.00	100%	102,564,450.00	102,564,450.00
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Jumlah penurunan angka pelanggaran usaha perikanan	1 Laporan		1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,833,800.00	1 Laporan	101,688,450.00	1 Laporan	102,564,450.00	1 Laporan	102,564,450.00	102,564,450.00

		Dalam Kabupaten/K ota														
3.25 .05. 2.01 .01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawa san Sumber Daya Perikana n Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genanga n Air Lainnya yang Dapat Diusahak an dalam Kabupate n/ Kota	1 Doku men		1 Doku men	100,00 0,000.0 0	1 Doku men	100,83 3,800.0 0	1 Dok ume n	101,6 88,45 0.00	1 Doku men	102,564 ,450.00	1 Dok ume n	10 2,5 64, 45 0.0 0		
Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten boalemo																

3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tukar Nelayan	96,93 %		97.89 %		98.87 %		99.86 %		100.86 %		100.86 %	1,178,676,200.00	
		Rata - rata konsumsi ikan masyarakat	44,67 Kg/Kapita/tahun		45,24 Kg/Kapita/tahun	1,149,205,100.00	46,36 Kg/Kapita/tahun	1,158,787,250.00	47,36 Kg/Kapita/tahun	1,168,608,950.00	48,36 Kg/Kapita/tahun	1,178,676,200.00	48,36 Kg/Kapita/tahun		
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Perikanan Skala Mikro	100%	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	

	ota	Skala Usaha dan Risiko													
3.25 .06. 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro	100%	-	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	300,000,000
3.25 .06. 2.02 .01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap	10 Unit	-	15 Unit	300,000,000	20 Unit	300,000,000	25 Unit	300,000,000	30 Unit	300,000,000	30 Unit	300,000,000	300,000,000

		Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko													
3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran bahan baku pengolahan ikan	100%	-	100%	649,205,100.00	100%	658,787,250.00	100%	668,608,950.00	100%	678,676,200.00	100%	678,676,200.00	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk	1.500 Ton	-	1.500 Ton	250,000,000	2.000 Ton	250,000,000	2.500 Ton	250,000,000	3.000 Ton	250,000,000	3.500 Ton	250,000,000	

		Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	1,278,000	10 Kelompok	399,205,100.00	15 Pelaku Usaha	408,787,250.00	20 Pelaku Usaha	418,608,950.00	25 Pelaku Usaha	428,676,200.00	25 Pelaku Usaha	428,676,200.00	

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu paksi untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan. NTN merupakan perbandingan antara indeks yang diterima dengan indeks yang dibayar oleh nelayan yang dinyatakan dalam indeks atau persentase. Secara konsep NTN menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan nelayan di pedesaan pesisir terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi perikanan tangkap
2. Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kap/tahun. Dalam melakukan analisis angka konsumsi ikan selalu disandingkan dengan data penyediaan ikan konsumsi pada periode waktu tertentu. Secara ideal, penyediaan konsumsi ikan harus selalu lebih besar dibandingkan dengan capaian angka konsumsi ikan dengan selisih yang tidak terlalu lebar serta mempunyai trend yang selalu naik dari tahun ke tahun
3. Persentase adalah suatu angka yang dinyatakan dalam bentuk pecahan perseratus. Persentase dinyatakan dalam satuan persen yang biasa ditulis dengan lambing satuan %. Setiap bilangan angka dapat dinyatakan sebagai perbandingan dengan angka 1. Angka 0 jika dinyatakan sebagai perbandingan, maka nilainya dapat ditulis sebagai 0,1 jika angka 0 dinyatakan dalam bentuk pecahan per seratus maka nilainya 0%. 0 persen artinya 0 perseratus nilainya sama dengan 0-100
4. Menurut definisinya, Pengertian Produksi dapat di pahami sebagai suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa, Sedangkan orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen.

TABEL TC 27.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Boalemo

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2			4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH					
Tujuan : I						
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo			1	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Review Menpan RB	
	Sasaran : 1.1					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik			Nilai SAKIP OPD	Hasil Evaluasi SAKIP	
			1.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	$\frac{\text{Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\text{total temuan OPD tahun berjalan}} \times 100$	
			1.2	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan Dinas	$\frac{\text{Jumlah BMD dalam kondisi baik}}{\text{total BMD}} \times 100$	

				Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total BMD	
			1.3	Persentase Penerimaan PAD (khusus OPD pemungut PAD) (juta)	$\frac{\text{Jumlah realisasi PAD setahun DKP}}{\text{Jumlah target PAD DKP}} \times 100$	
			1.4	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis}}{\text{total jumlah ASN}} \times 100$	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Kelautan dan Perikanan	$\frac{\text{Hasil Pelaksanaan kegiatan program penunjang administrasi perkantoran}}{\text{Target Pelaksanaan kegiatan program penunjang administrasi perkantoran}} \times 100$	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus diselesaikan}} \times 100$	

		n	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus diselesaikan}} \times 100$	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	Jumlah Pendapatan perangkat daerah	Jumlah Pendapatan an perangkat daerah	

Daerah			
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Kepegawaian PD yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus diselesaikan}} \times 100$	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah Perlengkapan PD yang tersedia}}{\text{Jumlah Kebutuhan Perlengkapan PD setahun}} \times 100$	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket	

Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah di OPD $\frac{\text{JumlahJasaPerlengkapanKantoryangdibutuhkan dalamsetahun}}{100} \times 100$	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	Tersedian ya Jasa Perlengka pan Kantor yang dibutuhka n dalam setahun	x 100	
			Jumlah Jasa Perlengka pan Kantor yang dibutuhka n dalam setahun		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	Kondisi Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h di OPD dalam kondisi baik	x 100	

		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h di OPD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Jumlah Unit	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Unit	

		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Unit	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Unit	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Unit	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Unit	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Tujuan : II					
Meningkatkan Perekonomian masyarakat yang berkelanjutan					
Sasaran : 1.2					
Meningkatnya agribisnis secara terpadu dan kompetitif					
			Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kelautan dan perikanan}}{\text{jumlah PDRB}} \times 100$	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Meningkat Hasilnya	Produksi Tangkap = $\sum$ Produksi Bulanan (1-12)	

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Penyediaan sarana dan prasana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Srana dan Prasana yang di sediakan $\frac{\text{Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana}} \times 100$	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Data	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Unit	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Jumlah Unit	
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitasi dan pengembangan lembaga usaha kelompok nelayan kecil	Jumlah Kelompok Nelayan yang di fasilitasi dan kembangkan $\frac{\text{Jumlah Kelompok Nelayan}}{\text{Jumlah Kelompok Nelayan}} \times 100$	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Orang	

Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Kelompok	
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit	
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	$\frac{\text{Jumlah Pengelola an dan Penyeleng garaan TPI}}{\text{Jumlah TPI}} \times 100$	
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Dokumen	
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan	
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat	Persentase Penetapan dan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	$\frac{\text{Jumlah Tanda daftar Kapal sampai dengan 10 GT yang di terbitkan}}{\text{Jumlah Kapal yang berukuran n 10 GT}} \times 100$	

Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi	
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan yang berukuran sampai dengan 10 GT $\frac{\text{Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan yang berukuran sampai dengan 10 GT}}{\text{Jumlah Kapal yang berukuran sampai 10 GT}} \times 100$	

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan	Jumlah Dokumen	
Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi	
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	$\frac{\text{Jumlah Tanda daftar Kapal sampai dengan 10 GT yang di terbitkan}}{\text{Jumlah Kapal yang berukuran 10 GT}} \times 100$	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	

Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Produksi Budidaya = $\sum$ Produksi Bulanan (1-12)	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan}}{\text{Jumlah Pembudidayaan Ikan}} \times 100$	
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang budidaya Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen	

Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan	Jumlah Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan $\frac{\text{Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana}} \times 100$	
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kelompok	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kelompok	
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Jumlah Kelompok	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok	
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu)	Persentase Fasilitas penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan	Jumlah fasilitas penerbitan TDPIK Pembudidayaan $\frac{\text{Jumlah Fasilitas Pembudidayaan}}{\text{Jumlah Fasilitas Pembudidayaan}} \times 100$	

daerah kabupaten/kota	Kecil (TDPIK)	Ikan	
		Jumlah Pembudidaya ikan	
Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidaya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	$\frac{\text{Jumlah Penyediaan Sarana pengelolaan an Pembudidayaan Ikan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana}} \times 100$	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket	
Perencanaan, dan Pengembangan, Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan	Jumlah Kelompok	

			Ikan di Darat				
		Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penurunan angka pelanggaran	Jumlah pelanggaran yang tertangani Total jumlah pelanggaran	x 100		
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah penurunan angka pelanggaran usaha perikanan	Jumlah laporan			
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen			
	Sasaran : 1.3						
	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten boalemo						
			Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang Meningkat	Indeks yang diterima (it)	x 100		
				Indeks yang dibayar			

				(ib)	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rata - rata konsumsi ikan masyarakat	$\frac{\text{Produksi ikan (tangkap+ budidaya) - Volume pemasaran (eksport + losses)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Perikanan Skala Mikro	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Perikanan}}{\text{Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Perikanan}} \times 100$	
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Doumen	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro	$\frac{\text{Jumlah Pembinaan Mutu hasil pengolahan dan pemasaran}}{\text{Jumlah Kelompok usaha pengolahan dan pemasaran}} \times 100$	

		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit	
		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran bahan baku pengolahan ikan	$\frac{\text{Jumlah Penyaluran dan pengolahan bahan baku yang di sediakan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Penyaluran bahan baku pengolahan ikan}} \times 100$	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ton	
		Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Kelompok	



KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Potensi perikanan tangkap Kabupaten Boalemo tidak bisa dipisahkan dari potensi perikanan tangkap yang berbasis pada WPP (Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan) dan di akui secara Nasional maupun Internasional. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.1/MEN/2009, dimana potensi perikanan tangkap Kabupaten Boalemo masuk kedalam WPP 715 (perairan Teluk Tomini sampai Perairan Laut Seram) potensi perikanan tangkapnya ± 595.620 Ton per tahun.

Kegiatan perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Boalemo merupakan perikanan rakyat atau perikanan artisanal. Berdasarkan karakteristik wilayah penangkapan dan sumberdaya ikannya, kegiatan perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Boalemo dapat dibedakan atas tiga kategori yaitu perikanan pantai, perikanan pesisir dan perikanan laut dalam. Kegiatan perikanan pantai adalah kegiatan penangkapan ikan pada perairan pesisir dangkal dekat pantai (zona pasang surut), baik dengan menggunakan alat penangkapan ikan menetap (pasif) maupun alat penangkapan ikan bergerak (aktif).

Dalam operasional penangkapan ikan, kegiatan perikanan pantai tidak menggunakan alat apung (perahu) sebagai alat bantu akan tetapi alat apung atau perahu hanya digunakan sebagai sarana transportasi. Kegiatan perikanan pesisir yaitu aktivitas penangkapan ikan di perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil pada kedalaman perairan kurang dari 100 meter dan jangkauan berkisar antara 1 sampai 4 mil laut dari garis pantai, baik dengan menggunakan alat tangkap bergerak maupun alat menetap. Sedangkan perikanan laut dalam yaitu aktivitas penangkapan ikan pada daerah perairan yang dalam yaitu lebih dari 100 meter.

Kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Boalemo berkembang lebih dulu dan lebih cepat dibanding kegiatan perikanan budidaya. Bahkan kegiatan perikanan tangkap dalam konteks kawasan minapolitan akan menjadi penunjang utama bagi kegiatan perikanan budidaya, terutama sekali untuk penyediaan pakan segar.

Kegiatan perikanan budidaya yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Boalemo adalah budidaya laut, budidaya air payau, dan budidaya air tawar. Secara

umum kapasitas usahanya masih berupa skala kecil dengan menggunakan modal terbatas yang bersumber dari keuangan keluarga/pribadi, disamping itu terdapat beberapa lokasi demplot yang digulirkan oleh Pemerintah (kerapu tikus, kerapu cantang, udang vaname, ikan lele, ikan nila dan rumput laut) serta beberapa usaha perorangan dengan skala menengah. Para pembudidaya ikan di Kabupaten Boalemo melaksanakan kegiatan hanya melaksanakan kegiatan budidaya perikanan berupa budidaya air payau (tambak) pada lahan seluas 24,76 hektar.

Pengembangan pertambakan di Kabupaten Boalemo menghadapi permasalahan berupa kekurangan sumber daya manusia (SDM) pembudidaya ikan karena jenis usaha perikanan lainnya dinilai lebih menarik. Selain itu, hingga kini sistem pasok dan buang air tambak belum memiliki irigasi teknis yang memadai. Dengan kondisi saat ini, sangat sulit bagi para pembudidaya ikan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tambak, padahal areal atau lahan pertambakan sangat potensial untuk dikembangkan.

Dari ulasan diatas maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo untuk periode 2017-2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD. Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo untuk periode 2023-2026 antara lain :

1. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
2. Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
3. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
4. Rata - rata Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun)
5. Nilai SAKIP OPD
6. Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP
7. Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
8. Jumlah Penerimaan PAD (khusus OPD pemungut PAD) (juta)
9. Presentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan

Adapun target capaian indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo untuk periode tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel T-28 berikut :

Tabel T-C28

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo

NO	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2021	Proyeksi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
	Urusan Pemerintahan Pilihan									
	Urusan Pemerintahan Penunjang OPD									
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo										
1	Nilai SAKIP Kabupten	Nilai	n/a	57	57	60	63	66	66	
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik										
2	Nilai SAKIP OPD	Predikat	n/a	B	B	BB	BB	A	A	
3	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BP KP	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	n/a	80	80	80	80	80	80	
5	Jumlah Penerimaan PAD (khusus OPD pemungut PAD) (juta)	Dokumen	n/a	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
6	Presentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	n/a	25	25	30	35	40	40	
Peningkatan Agrobisnis Sektor Kelautan dan Perikanan										
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	96,92	96,93	97.89	98.87	99.86	100.86	100.86	

8	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Meningkatkan Hasilnya	Ton	22,625	26,820	27,088	27,359	27,632	27,908	27,908
9	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang Meningkatkan Hasilnya	Ton	2,089	2,300	2,323	2,346	2,369	2,393	2,393
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Konsumsi Ikan Kabupaten Boalemo									
10	Rata – rata konsumsi ikan masyarakat	Kg/Kapita/Thn	47,25	44,67	45,24	46,36	47,36	48,36	48,36

Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo yang ingin dicapai sesuai tujuan dan sasaran diatas, maka dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo untuk periode tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel
Indikator Kegiatan Utama (IKU)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo

NO	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2021	Proyeksi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	96,92	96,93	97.89	98.87	99.86	100.86	100.86	
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Meningkatkan Hasilnya	Ton	22,625	26,820	27,088	27,359	27,632	27,908	27,908	
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang Meningkatkan Hasilnya	Ton	2,089	2,300	2,323	2,346	2,369	2,393	2,393	
4	Rata – rata konsumsi ikan masyarakat	Kg/Kapita/ Thn	47,25	44,67	45,24	46,36	47,36	48,36	48,36	



P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2011-2025, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo tahun 2023-2026 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan penyusunan Rencana Strategis ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis 2023-2026 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo periode tahun 2023-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Boalemo yang Sejahtera serta Kabupaten Boalemo Damai Bertasbih.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOALEMO



Ir. ASRA UMAR MURAD
NIP. 19680928 200012 2 006